

KEADILAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PHK SECARA SEPIHAK PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

ABSTRAK

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki jumlah buruh yang tidak sedikit, kompleks dan dinamis. Salah satu hal yang masih disorot hingga saat ini adalah terkait upah minimum yang dirasa masih sering dipersoalkan di Indonesia. Disisi para pekerja dan buruh mengharapkan upah yang layak atau tinggi, pada pengusaha yang juga memberatkan sebab akan berdampak pada tingginya operasional atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering kali mengakibatkan perbedaan paham antara pengusaha dan pekerja. Secara hukum, pekerja/buruh dan pengusaha dianggap sebagai mitra yang setara, namun dalam praktiknya, prinsip kemitraan ini seringkali sulit diwujudkan. UU Cipta Kerja banyak menuai kontroversi dikalangan masyarakat khususnya buruh/pekerja di Indonesia, karena dianggap banyak perubahan signifikan yang dapat merugikan hak-hak pekerja. dengan hal tersebut Penting bagi para pekerja agar diatur secara aktif sehingga perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang ada pada saat ini, Hasil temuan dari penelitian adalah berdasarkan pertimbangan para Hakim di dalam putusan nomor 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu studi dokumen yang bersifat kualitatif. Dalam isi putusan 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg Penulis berpendapat dalam pertimbangannya telah memutuskan bahwa hakim tidak memberikan hak-hak dan keadilan yang layak dan adil terhadap para pekerja/buruh seperti dalam undang-undang No.13 tahun 2003 yang Dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata Kunci:

Pemutusan Hubungan Kerja, Hak pekerja, Kompensasi.

JUSTICE TOWARDS THE RIGHTS OF WORKERS AFFECTED BY UNILATED RETACHMENTS POST TO THE JOB COPYRIGHT LAW

ABSTRACT

Developing countries such as Indonesia have a large number of workers, complex and dynamic. One of the things that is still highlighted today is related to the minimum wage, which is still often questioned in Indonesia. On the side of workers and laborers, expecting decent or high wages, for employers it is also burdensome because it will have an impact on the high operations or costs that the company must incur. Termination of Employment. The Job Creation Law has reaped a lot of controversy among the community, especially workers/workers in Indonesia, because it is considered that there are many significant changes that can harm workers' rights. It is important for workers to be actively regulated so that companies can maintain their competitive advantage in the current market, The findings of the study are based on the Judges' considerations in decision number 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg, The Panel of Judges is of the opinion that the Plaintiff's lawsuit can be granted as an improvement as stated in the verdict. This research was carried out by normative juridical research method, namely the study of qualitative documents. In the content of decision 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg, the author argues that the judge in his consideration has decided and has not provided proper and fair rights and justice to workers/laborers in the provisions of the Job Creation Law.

Keyword:

Intellectual Disabilities, Inheritance, Empowerment.